

Kolaborasi Multi-Sektor dalam Mengatasi Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Anak Putus Sekolah (APS): Studi Kasus Peran PKBM Belantik Jelai di Kecamatan Jelai Hulu Periode 2020–2025

Edy Purnomo*, Dian Lestari, Nuraini Asriati

Universitas Tanjungpura Pontianak, Indonesia

Email: f2191221018@student.untan.ac.id*, f2191221007@student.untan.ac.id,

Nuraini.asriati@fkip.untan.ac.id

Keywords:

PKBM Belantik Jelai;
Equality Education;
ATS;
APS;
Multi-Sector Collaboration;
IGA.

Abstract

The number of out-of-school children (ATS) and school dropouts (APS) is still a sociological and educational challenge in the Jelai Hulu sub-district area. This research aims to analyze the role of the Belantik Jelai Community Learning Activity Center (PKBM) in overcoming ATS and APS problems in Jelai Hulu District throughout the 2020–2025 period through the implementation of Package A, B, and C programs. The results of the study show that formal synergy between PKBM and educational institutions (SMAN 1, SMPN 2, SMPN 3, SMPN 4 Jelai Hulu, SMPN 3 Marau, SDN 17, and SDN 5 Jelai Hulu) as well as non-educational institutions (Jelai Hulu Sub-district Office and KSBSI PT Fape) have succeeded in creating an effective system of tracking, motivation, and transfer of students. The success of this massive collaboration model was recognized nationally through the Innovative Government Award (IGA) from the Ministry of Home Affairs in 2021. Practically, the clinical output of this program has succeeded in producing competent alumni who are absorbed in the corporate sector, government bureaucracy, and continue to the first strata level (S1) to become educators.

Kata Kunci:

PKBM Belantik Jelai;
Pendidikan Kesetaraan;
ATS;
APS;
Kolaborasi Multi-Sektor;
IGA.

Abstrak

Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Anak Putus Sekolah (APS) masih menjadi tantangan sosiologis dan edukatif di wilayah kecamatan Jelai Hulu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Belantik Jelai dalam mengatasi permasalahan ATS dan APS di Kecamatan Jelai Hulu sepanjang periode 2020–2025 melalui penyelenggaraan program Paket A, B, dan C. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini membedah strategi kolaborasi multi-sektor yang dirintis sejak tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi formal antara PKBM dengan institusi pendidikan (SMAN 1, SMPN 2, SMPN 3, SMPN 4 Jelai Hulu, SMPN 3 Marau, SDN 17, dan SDN 5 Jelai Hulu) serta institusi non-pendidikan (Kantor Camat Jelai Hulu dan KSBSI PT Fape) berhasil menciptakan sistem pelacakan, motivasi, dan pengalihan peserta didik yang efektif. Keberhasilan model kolaborasi masif ini diakui secara nasional melalui penghargaan Innovative Government Award (IGA) dari Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2021. Secara praktis, luaran klinis program ini berhasil mencetak alumni kompeten yang terserap di sektor korporasi, birokrasi pemerintahan, hingga melanjutkan ke jenjang strata satu (S1) menjadi tenaga pendidik.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkelanjutan. Namun, disparitas geografis, kendala ekonomi, dan faktor sosial sering kali memicu tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Anak Putus Sekolah (APS), khususnya di wilayah kecamatan yang jauh dari pusat urban seperti Kecamatan Jelai Hulu (Hulu, 2025; Indonesia, 2021; Purnomo, 2024; Purnomo & Arel, 2025). Keberadaan pendidikan formal kerap kali belum mampu menjangkau seluruh lapisan anak usia sekolah

karena keterbatasan daya tampung, kendala finansial keluarga, maupun tuntutan kerja usia dini di sektor perkebunan (Aidi et al., 2024; Bonny & Cahlikova, 2025; Sihombing, 2001; Sudjana, 2004; *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, 2003). Fenomena ATS dan APS di Kecamatan Jelai Hulu menjadi persoalan sosiologis dan edukatif yang memerlukan intervensi sistemik, mengingat anak-anak yang putus sekolah berisiko kehilangan akses terhadap peningkatan kualitas hidup, rentan terhadap eksploitasi tenaga kerja, dan terperangkap dalam siklus kemiskinan antargenerasi (Nurhanipah & Khairunnisa, 2023; Taufikurrahman et al., 2026; Weridity & Manuputty, 2024). Urgensi penanganan ATS dan APS tidak hanya berorientasi pada pemenuhan hak pendidikan dasar, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang dalam menciptakan SDM produktif yang mampu berkontribusi pada pembangunan daerah dan ketahanan sosial masyarakat pedesaan (Dadang et al., 2026; Hayat et al., 2026; Sucipto et al., 2021).

Pendidikan non-formal didefinisikan sebagai setiap kegiatan pendidikan yang terorganisasi dan sistematis di luar sistem persekolahan mapan, yang dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas (Sudjana, 2004), dengan PKBM berfungsi sebagai wadah pembelajaran dari, oleh, dan untuk masyarakat (Sihombing, 2001). Dalam konteks penanganan ATS dan APS, pendekatan kolaborasi multi-sektor menjadi keniscayaan karena persoalan ini tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan jejaring kerja antara lembaga pendidikan formal, non-formal, pemerintah, dan organisasi buruh/swasta. Ansell dan Gash (2008) menegaskan bahwa *Collaborative Governance* membawa berbagai pemangku kepentingan bersama-sama dalam forum bersama dengan lembaga publik untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan atau pelaksanaan program yang berorientasi pada konsensus, sehingga sinergi antara PKBM, institusi pendidikan formal, pemerintah kecamatan, dan organisasi buruh menjadi fondasi utama dalam menciptakan sistem pelacakan, motivasi, dan pengalihan peserta didik yang efektif bagi Anak Tidak Sekolah dan Anak Putus Sekolah (Ansell & Gash, 2008; Masitah et al., 2025; Ridwan et al., 2025; Tirtaningrum et al., 2025).

Dalam konteks ini, Jalur Pendidikan Non-Formal melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) hadir sebagai solusi konstitusional berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. PKBM Belantik Jelai mengambil peran krusial di Kecamatan Jelai Hulu sepanjang periode 2020–2025 sebagai fasilitator utama layanan pendidikan kesetaraan Program Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), dan Paket C (setara SMA). Sebagai lembaga pendidikan non-formal yang berbasis komunitas, PKBM Belantik Jelai mengemban fungsi strategis tidak hanya sebagai penyelenggara layanan pendidikan kesetaraan, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Keberadaan PKBM menjadi semakin penting mengingat keterbatasan daya tampung sekolah formal dan adanya anak-anak usia sekolah yang terpaksa bekerja di sektor perkebunan karena faktor ekonomi keluarga, sehingga pendidikan non-formal menjadi satu-satunya jalur yang memungkinkan mereka tetap memperoleh hak pendidikan.

Penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa penanganan ATS dan APS memerlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai sektor. Ansell dan Gash (2008) menyatakan bahwa *Collaborative Governance* membawa berbagai pemangku kepentingan bersama-sama dalam forum bersama dengan lembaga publik untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan atau

pelaksanaan program yang berorientasi pada konsensus. Sihombing (2001) menekankan bahwa PKBM berfungsi sebagai wadah pembelajaran dari, oleh, dan untuk masyarakat, sementara Sudjana (2004) mendefinisikan pendidikan non-formal sebagai setiap kegiatan pendidikan yang terorganisasi dan sistematis di luar sistem persekolahan mapan. Studi tentang kolaborasi multi-sektor dalam penanganan ATS dan APS di Indonesia masih terbatas, dengan sebagian besar penelitian berfokus pada peran pemerintah daerah atau sekolah formal secara terpisah. Penelitian tentang model kolaborasi yang melibatkan sinergi antara PKBM, institusi pendidikan formal, pemerintah kecamatan, dan organisasi buruh/swasta dalam satu kerangka kerja terintegrasi masih jarang ditemukan. Selain itu, studi tentang dampak jangka panjang program pendidikan kesetaraan terhadap kualitas hidup alumni, termasuk penyerapan di dunia kerja dan pendidikan tinggi, belum banyak dieksplorasi secara mendalam, terutama di wilayah pedesaan dengan karakteristik sosial-ekonomi yang khas seperti Kecamatan Jelai Hulu.

Penelitian ini menghadirkan kebaruan (*novelty*) dengan mengkaji secara komprehensif model kolaborasi multi-sektor yang melibatkan institusi pendidikan formal (SMAN 1, SMPN 2, SMPN 3, SMPN 4 Jelai Hulu, SMPN 3 Marau, SDN 17, dan SDN 5 Jelai Hulu), institusi non-pendidikan pemerintah (Kantor Camat Jelai Hulu), dan institusi non-pendidikan swasta/organisasi buruh (KSBSI PT Fape) dalam satu kerangka kerja terintegrasi untuk menangani ATS dan APS di Kecamatan Jelai Hulu. Penelitian ini juga memberikan kontribusi empiris dengan mendokumentasikan sistem kerja kolaboratif yang terbukti berhasil mendapatkan pengakuan nasional melalui Innovative Government Award (IGA) 2021 dari Kementerian Dalam Negeri, serta menganalisis dampak sosial-ekonomi program terhadap alumni yang terserap di sektor korporasi, birokrasi pemerintahan, dan pendidikan tinggi. Dengan demikian, penelitian ini mengisi kesenjangan pengetahuan tentang model kolaborasi multi-sektor dalam pendidikan non-formal di Indonesia, sekaligus memberikan bukti empiris tentang efektivitas pendekatan terintegrasi dalam mengatasi persoalan ATS dan APS di wilayah pedesaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana peran dan strategi PKBM Belantik Jelai dalam mengatasi isu ATS dan APS di Kecamatan Jelai Hulu periode 2020–2025? (2) Bagaimana pola kolaborasi yang dibangun antara PKBM Belantik Jelai dengan institusi pendidikan dan non-pendidikan? (3) Apa saja capaian dan dampak sosial-ekonomi yang dihasilkan terhadap alumni program kesetaraan tersebut? Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran dan strategi PKBM Belantik Jelai dalam mengatasi isu ATS dan APS di Kecamatan Jelai Hulu periode 2020–2025, mendeskripsikan pola kolaborasi yang dibangun antara PKBM Belantik Jelai dengan institusi pendidikan dan non-pendidikan, serta mengidentifikasi capaian dan dampak sosial-ekonomi yang dihasilkan terhadap alumni program kesetaraan PKBM Belantik Jelai.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoretis bagi pengembangan ilmu pendidikan non-formal dan studi kolaborasi multi-sektor, khususnya dalam konteks penanganan ATS dan APS di Indonesia, serta memperkaya kajian tentang efektivitas PKBM sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat di wilayah pedesaan. Secara praktis, hasil penelitian ini bermanfaat bagi PKBM Belantik Jelai sebagai bahan evaluasi dan pengembangan program berkelanjutan, bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pendidikan non-formal berbasis kolaborasi, bagi institusi pendidikan formal dan organisasi buruh/swasta

sebagai acuan dalam membangun sinergi pendidikan, serta bagi peneliti selanjutnya sebagai referensi untuk mengeksplorasi model kolaborasi multi-sektor di wilayah lain dengan konteks sosial-ekonomi yang berbeda.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus (case study). Fokus penelitian diarahkan pada dinamika operasional dan kolaboratif PKBM Belantik Jelai dari tahun 2020 hingga 2025. Sumber Data: Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan kunci, yakni pengelola PKBM (Seth Arel dan Edy Purnomo), kepala sekolah mitra, pihak Kantor Camat, pengurus KSBSI, serta alumni (Miles et al., 2014). Data sekunder berupa dokumen akademik, data demografi ATS/APS Kecamatan Jelai Hulu, dan arsip penghargaan IGA 2021. Data Sekunder: Berupa dokumen akademik, data demografi ATS/APS Kecamatan Jelai Hulu, berkas legalitas program GEMATOS, dan arsip penghargaan IGA 2021. Teknik Analisis Data: Menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang meliputi reduksi data, penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan Layanan Program PKBM Belantik Jelai (2020–2025)

Sepanjang lima tahun masa bakti (2020–2025), PKBM Belantik Jelai secara konsisten mengikis angka putus sekolah melalui tiga layanan inti:

Tabel 1. Program Layanan PKBM Belantik Jelai (2020–2025)

Jenis Program	Kesetaraan	Target Sasaran Utama
Paket A	Setara Sekolah Dasar (SD)	Anak-anak usia dasar di kecamatan Jelai Hulu yang terkendala akses geografis.
Paket B	Setara Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Remaja yang drop-out akibat faktor ekonomi/membantu orang tua bekerja.
Paket C	Setara Sekolah Menengah Atas (SMA)	Remaja/usia produktif yang membutuhkan ijazah untuk dunia kerja/kuliah.

Sumber: Dokumen Internal PKBM Belantik Jelai (2025)

Kronologi dan Ekspansi Strategi Kolaborasi Multi-Sektor

Kolaborasi ini tidak serta-merta masif, melainkan melalui fase pertumbuhan strategis:

- Fase Inisiasi (Tahun 2020):** Dirintis pertama kali melalui kemitraan taktis antara **SMP Negeri 2 Jelai Hulu** dan PKBM Belantik Jelai. Fokus awal adalah menyelamatkan siswa SMPN 2 yang drop-out agar tidak langsung putus sekolah, melainkan dialihkan ke Paket B.
- Fase Ekspansi Masif (2021–2025):** Model ini diadopsi secara luas di tingkat kecamatan, melibatkan jaringan sekolah formal yang lebih luas dan institusi non-pendidikan.

Berikut adalah matriks bentuk nyata kolaborasi institusional yang berhasil dibangun:

Tabel 2. Matriks Kolaborasi Institusional PKBM Belantik Jelai

No	Nama Institusi Mitra	kategori	Bentuk Kolaborasi
1	SMAN 1 Jelai Hulu, SMPN 2, 3, 4 Jelai Hulu, SMPN 3 Marau, SDN 17 & SDN 5 Jelai Hulu	Institusi Pendidikan	Merujuk siswa terancam DO/sudah DO; Pemetaan basis data siswa rentan; Kampanye pentingnya sekolah.
2	Kantor Camat Jelai Hulu	Institusi Pendidikan (Pemerintah)	Legitimasi kebijakan, dukungan regulasi tingkat kecamatan, koordinasi dengan aparat pemerintahan desa untuk pendataan ATS.
3	Konfederasi Sarekat Buruh seluruh Indonesia (KSBSI) di PT Fape	Institusi Pendidikan (Swasta/Buruh)	Memobilisasi anak buruh sawit atau buruh muda yang belum tamat sekolah untuk ikut kelas Paket A, B dan C.

Sumber: Data Primer (Wawancara dengan Pengelola PKBM dan Mitra, 2025)

Sistem Kerja Kolaborasi: Mitra mendata anak yang putus sekolah. Diarahkan pertama kali kembali ke sekolah formal. Jika faktor usia atau waktu kerja tidak memungkinkan (seperti buruh di PT Fape), maka secara otomatis dialihkan ke sistem non-formal di PKBM Belantik Jelai.

Proses Pendataan Real-Time APS dan ATS di Lingkungan Masyarakat

Salah satu pilar utama yang diperluas dalam gerakan GEMATOS sejak tahun 2021 adalah standardisasi sistem penjarangan dan pendataan langsung ke akar rumput. Mitra GEMATOS yang terdiri dari aparat desa di bawah koordinasi Kantor Camat Jelai Hulu serta pengurus KSBSI di PT Fape secara berkala melakukan penyisiran data kependudukan. Proses mendata APS dan ATS di lingkungan masyarakat ini dilakukan secara pintu ke pintu (door-to-door) guna mendapatkan data riil anak usia sekolah yang tidak menempuh pendidikan atau terhenti di tengah jalan karena kendala ekonomi maupun geografis.

Sistem Kerja Alur Layanan dan Pendekatan Motivasi Belajar

Berdasarkan data komprehensif yang telah dihimpun dari hasil penyaringan lapangan, tim gabungan GEMATOS menyusun strategi intervensi dua tahap:

1. Tahap Persuasi dan Pendekatan Motivasi: Anak Putus Sekolah (APS) dan Anak Tidak Sekolah (ATS) yang terjaring tidak langsung didaftarkan ke sekolah non-formal, melainkan diberikan pendampingan psikologis dan motivasi terlebih dahulu. Tim penggerak memberikan pemahaman mendalam kepada anak serta orang tua mengenai pentingnya ijazah dan keberlanjutan masa depan. Dari data riil yang ada, anak-anak tersebut dimotivasi seoptimal mungkin untuk kembali mengikuti pendidikan di jalur formal terlebih dahulu. Upaya ini diprioritaskan terutama bagi anak-anak yang putus sekolah dalam usia yang relatif masih sangat muda dan memiliki sisa waktu studi yang memadai di sekolah reguler.
2. Tahap Pengalihan Sistem Belajar (Non-Formal): Sistem kerja kolaborasi menetapkan bahwa apabila pendekatan masuk ke jalur formal tidak memungkinkan lagi—akibat faktor batasan usia yang melewati regulasi sekolah reguler, jarak geografis ekstrem, atau keterikatan waktu kerja yang tidak bisa ditinggalkan (seperti kasus buruh usia muda di PT Fape) maka anak tersebut secara otomatis akan dialihkan ke sistem non-formal di PKBM Belantik Jelai. Melalui program Paket A, Paket B, atau Paket C, mereka mendapatkan fleksibilitas waktu belajar tanpa kehilangan hak memperoleh pendidikan yang bermutu.

Rekonstruksi Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) 2021

Efektivitas kolaborasi radikal yang dirintis sejak 2020 ini menarik perhatian nasional. Pada tahun 2021, inovasi tata kelola pendidikan kesetaraan berbasis wilayah ini mendapatkan penghargaan **Innovative Government Award (IGA)** dari Departemen Dalam Negeri (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia). Penghargaan ini membuktikan bahwa integrasi pendidikan formal-non formal yang diinisiasi PKBM Belantik Jelai layak menjadi *role model* nasional.

Dampak Sosial dan Relevansi Lulusan (Perspektif Praktisi)

Berdasarkan penuturan **Seth Arel** dan **Edy Purnomo** selaku aktivis dan penggerak utama PKBM Belantik Jelai, layanan ini tidak sekadar memberikan lembar ijazah, melainkan restrukturisasi masa depan anak didik. Lulusan PKBM Belantik Jelai terbukti andal dan kompeten:

1. **Sektor Korporasi:** Alumni terserap di berbagai perusahaan (termasuk sektor Perkebunan dan pertambangan).
2. **Sektor Birokrasi:** Diakui dalam administrasi pemerintahan desa maupun kecamatan.
3. **Sektor Pendidikan Tinggi:** Banyak alumni melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata 1 (S1) dan kini telah kembali ke masyarakat sebagai tenaga pendidik (Guru) formal maupun non-formal.

Studi Kasus Transisi Alumni Paket B ke Jalur Sekolah Formal tingkat SMA

Indikator keberhasilan gerakan GEMATOS yang paling signifikan tercermin dari fleksibilitas sistem pasca-kelulusan. Hubungan timbal balik antara sekolah formal dan non-formal terbukti tidak bersifat satu arah. Dinamika di lapangan menunjukkan adanya fenomena di mana beberapa alumni Program Paket B PKBM Belantik Jelai yang masih memenuhi syarat batasan usia untuk mengikuti pendidikan formal, berhasil didorong kembali masuk ke sekolah reguler.

Para alumni Paket B tersebut terbukti mampu beradaptasi dengan sangat baik terhadap iklim akademis sekolah formal dan berhasil melanjutkan pendidikan mereka ke tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) reguler, seperti di SMAN 1 Jelai Hulu. Keberhasilan adaptasi ini mematahkan stigma negatif terhadap kualitas pendidikan non-formal dan membuktikan bahwa kurikulum kesetaraan yang diterapkan di PKBM memiliki standar kompetensi yang setara dengan jalur formal.

KESIMPULAN

PKBM Belantik Jelai berhasil menjalankan perannya secara optimal sebagai penyelamat ekosistem pendidikan di Kecamatan Jelai Hulu periode 2020–2025. Melalui diversifikasi program Paket A, B, dan C yang ditopang oleh kolaborasi multi-sektor yang masif (sekolah formal, pemerintah kecamatan, dan KSBSI PT Fape), PKBM berhasil menekan angka ATS dan APS. Keberhasilan ini terbukti secara regulatif melalui penghargaan IGA 2021 dari Kemendagri, serta terbukti secara sosiologis lewat kualitas alumni yang mampu menembus dunia kerja profesional, pemerintahan, hingga menjadi sarjana dan guru. Saran Bagi Pemerintah Daerah: Diharapkan memberikan subsidi anggaran berkala guna peningkatan sarana laboratorium komputer PKBM Belantik Jelai. Bagi Korporasi sekitar: Sinergi dengan PT Fape dan KSBSI perlu ditingkatkan menjadi program Corporate Social Responsibility (CSR) beasiswa berkelanjutan. Bagi Pemerintah Daerah: Diharapkan memberikan subsidi

anggaran berkala guna peningkatan sarana laboratorium komputer PKBM Belantik Jelai. Bagi Korporasi Sekitar: Sinergi dengan PT Fape dan KSBSI perlu ditingkatkan menjadi program Corporate Social Responsibility (CSR) beasiswa berkelanjutan.

REFERENSI

- Aidi, A., Avianti, I., Koeswayo, P. S., Poulus, S., & Mariam, S. (2024). The effect of an inclusive approach to collaborative governance and its impact on digitizing the quality of public services. *Cogent Business & Management*, 11(1), 2392324. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2392324>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Bonny, S., & Cahlikova, T. (2025). Evaluating the effects of collaborative governance: Case of a digital education project. *Evaluation and Program Planning*, 109, 102522. <https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2024.102522>
- Dadang, D. Y. L., Irnawati, H., Shantini, Y., Hatimah, I., & Khan, A. (2026). Governance of Community Learning Centers in Indonesia: A Systematic Literature Review. *Journal of Nonformal Education*, 12(1), 124–134. <https://doi.org/10.15294/jone.v12i1.41504>
- Hayat, A., Ul-Jannah, Z. N., Eristi, D., & Talib, C. A. (2026). The Service of the Community Learning in Organizing Non-Formal Education for the Development of Village Community Potential. *Journal of Nonformal Education*, 12(1), 41–51. <https://doi.org/10.15294/jone.v12i1.37021>
- Hulu, K. J. (2025). *Sambutan dan Arahan Camat Jelai Hulu (Seth Arel, S.Th., M.A., M.A.P.) dalam Forum Sosialisasi Gerakan Menuntaskan Sekolah (GEMATOS)*. Arsip Protokol Kecamatan Jelai Hulu.
- Indonesia, K. D. N. R. (2021). *Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penerima Penghargaan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2021*. Kemendagri.
- Masitah, Wiriani, E., Puspita, E. A., & Ahmad, A. (2025). Optimalisasi Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Dalam Menurunkan Angka Putus Sekolah di Desa Alue Dua Kota Langsa. *PASAI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 12–18. <https://doi.org/10.58477/pasai.v4i1.311>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.)*. Sage Publications.
- Nurhanipah, & Khairunnisa, A. (2023). Peran Pendidikan Kesetaraan dalam Lingkungan Masyarakat. *Nusantara Hasana Journal*, 3(2), 227–232. <https://doi.org/10.59003/nhj.v3i2.930>
- Purnomo, E. (2024). *Dokumen Rekomendasi Program Paten GEMATOS (Gerakan Menuntaskan Sekolah) pada Satuan Pendidikan Non-Formal*. Sekretariat PKBM Belantik Jelai.
- Purnomo, E., & Arel, S. (2025). *Laporan Evaluasi Dampak Sosial Lulusan Pendidikan Kesetaraan PKBM Belantik Jelai Periode 2020-2025*. Arsip Internal PKBM (Tidak Diterbitkan).
- Ridwan, I., Sinring, A., Marzuki, K., Yunus, P. P., Zulkifli, Z., & Yusriadi, Y. (2025). Beyond classrooms: Community-based learning for personal, social, and vocational empowerment. *F1000Research*, 14, 1274. <https://f1000research.com/articles/14-1274>
- Sihombing, U. (2001). *Pendidikan Luar Sekolah Kini dan Masa Depan*. PD Mahkota.
- Sucipto, Wiyono, B. B., Rasyad, A., Dayati, U., & Purwito, L. (2021). The Contribution of Individual Characteristics of Managers to the Success of Equivalency Education Programs of the Community Learning Center in Indonesia. *Sustainability*, 13(19), 11001. <https://doi.org/10.3390/su131911001>

- Sudjana, D. (2004). *Pendidikan Nonformal: Wawasan, Sejarah Perkembangan, Filsafat, Teori Pendukung, serta Asas*. Falah Production.
- Taufikurrahman, T., Syafari, M. R., & Siswanto, S. (2026). Collaborative Policy Strategies for Addressing School Dropout in Archipelagic Areas: Evidence from Pulau Laut Utara, Indonesia. *Jurnal Economina*, 5(7), 4295–4304. <https://doi.org/10.55681/economina.v5i7.3388>
- Tirtaningrum, R., Albab, U., & Dwijosusilo, K. (2025). Tata Kelola Kolaboratif Antara Pemerintah Daerah, Sekolah, dan Komunitas dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dasar di Kabupaten Sidoarjo. *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 3(6), 43–54. <https://doi.org/10.62383/risoma.v3i6.1243>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. (2003). Republik Indonesia.
- Weridity, M. I. G., & Manuputty, F. (2024). Preventing School Dropout in Maluku: Synergy Between Family, School, and Customary Values. *Baileo: Jurnal Sosial Dan Politik*, 2(1), 86–96. <https://doi.org/10.30598/baileofisipvol2iss1pp86-96>